

## The Importance of Pancasila as a System and Source of Political Ethics in Indonesia

*Journal of Creativity Student*

2021, Vol. 6(1) 1-42

© The Author(s) 2021

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

**Rosa Angela Stefany**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[arangelast@students.unnes.ac.id](mailto:arangelast@students.unnes.ac.id)

**Waspiah Waspiah**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[waspiah@mail.unnes.ac.id](mailto:waspiah@mail.unnes.ac.id)

### History of Manuscript

Submitted : August 21, 2020

Revised 1 : October 12, 2020

Revised 2 : November 7, 2020

Accepted : December 11, 2020

Online since : January 30, 2021

### Abstract

Ethics is the study of what is good and what is bad. Ethics consists of moral values that guide the life of a person or a group. Politics is an event, activity, or process that involves the government and society in a country in making policies, decisions, or distributing value (in the form of goods and services) to realize the welfare and survival of the community, nation and state. Pancasila is the basis of the

---

state and the ideology of the nation. Value is an unreal quality because it does not exist for itself, value requires a bearer to exist. The values contained in Pancasila are the basis of a system of political ethics. Political ethics based on Pancasila is political ethics in accordance with the values contained in Pancasila. Pancasila as the basis of the political ethics system means that Pancasila is the unity of the precepts, where the Pancasila precepts are a source of political ethics that must always be colored and practiced in the political life of the Indonesian nation. Pancasila is a source of moral ethics, especially in relation to the legitimacy of power, law, and various policies in the implementation and administration of the State.

### KEYWORDS

Pancasila ▪ System ▪ Sources ▪ Ethics ▪ Politics

## A. Pendahuluan

Moral berasal dari kata *mos* (*mores*) yang artinya kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dapat berupa kesetiaan serta kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moral dibedakan menjadi moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan etika, etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* memiliki arti sifat atau watak kebiasaan, sedangkan *ethikos* berarti susila atau kelakuan yang baik.

---

Menurut KBBI sendiri, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Mustansyir (2001) mengatakan bahwa etika mengandung tiga pengertian. Yang pertama, etika memiliki arti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok. Selanjutnya, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral misalnya kode etik. Yang terakhir, etika merupakan ilmu tentang yang baik atau yang buruk.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus negara atau *city state*. Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles, politik merupakan suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Politik juga memiliki arti bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar sistem etika politik. Etika politik, menurut Suseno (1994), adalah mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara. Sedangkan etika politik berdasarkan Pancasila adalah etika berpolitik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Etika politik Pancasila mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa, oleh karena itu nilai-nilai yang tersurat maupun yang tersirat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa, maupun masyarakat. Dengan kata lain nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma moral atau etika dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan pedoman tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, harus dipahami, dihayati, serta diamalkan dalam tata kehidupan berpolitik. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan

keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Apakah pengertian dari etika dan politik?
2. Bagaimana kaitan antara Pancasila dengan etika politik di Indonesia?
3. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem etika politik?
4. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber etika politik?
5. Mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem dan sumber etika politik di Indonesia?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengertian dari etika dan politik.
2. Mengetahui kaitan antara Pancasila dengan etika politik di Indonesia.
3. Mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem etika politik.
4. Mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber etika politik.
5. Mengetahui alasan Pancasila diperlukan sebagai sistem dan sumber etika politik di Indonesia.

---

## D. Hasil & Pembahasan

### 1. Pengertian Etika

Moral berasal dari kata *mos (mores)* yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moral dibedakan menjadi moral ketuhanan atau agama, moral, filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya.

Berkaitan dengan etika, etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* memiliki arti sifat atau watak kebiasaan, sedangkan *ethikos* berarti susila atau kelakuan yang baik. Menurut KBBI sendiri, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Meskipun etika sering diidentikkan dengan moral atau moralitas, namun moralitas lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi, etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam filsafat, terkadang etika disamakan dengan filsafat moral.

Mustansyir (2001) mengatakan bahwa etika mengandung tiga pengertian. Yang pertama, etika memiliki arti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok. Selanjutnya, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, misalnya kode etik. Yang terakhir, etika merupakan ilmu tentang yang baik atau yang buruk.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Etika tersebut terdiri atas nilai-nilai moral yang menjadi pegangan hidup seseorang atau suatu kelompok. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban moral yang harus dilaksanakan.

## 2. Pengertian Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus negara atau *city state*. Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles, politik merupakan suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Dalam arti luas, politik membahas secara rasional berbagai aspek negara dan kehidupan politik (Handoyo 2008). Politik dapat berarti suatu disiplin ilmu pengetahuan dan seni.

Politik dikatakan sebagai ilmu, karena politik memiliki objek, subjek, terminologi, ciri, teori, filosofis, dan metodologis yang khas dan spesifik serta diterima secara universal, di samping dapat diajarkan dan dipelajari oleh banyak orang. Politik juga disebut sebuah seni, karena banyak dijumpai politisi yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu menjalankan roda politik praktis. Dalam pendekatan yang menekankan pada aspek kekuasaan, formulasi Laswell mengartikan politik sebagai seseorang yang mendapatkan barang dan jasa apa, kapan memperolehnya, dan bagaimana cara mendapatkannya (Goodin dan Hans-Dieter Klingemann 1996).

Dalam pendekatan keputusan, Axford and Gary K. Browning (2002) mendefinisikan politik sebagai proses dengan mana kelompok-kelompok yang membuat keputusan kolektif. Pandangan tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Budiardjo (1992:8) yang memahami politik sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Crick (1976:5) mengatakan bahwa politik merupakan aktivitas dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda diterima dalam unit aturan, serta didamaikan dengan berbagai kekuasaan secara proporsional guna mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup seluruh komunitas. Pandangan tersebut fokus pada bagaimana kepentingan yang berbeda di satukan melalui pembagian kekuasaan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dalam erspektif yang menekankan pada kebijakan publik, seperti halnya David Easton (dalam Supardan 2008), politik didefinisikan sebagai studi atau

---

kajian tentang pembuatan kebijakan publik. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa politik merupakan suatu peristiwa, kegiatan, atau proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara dalam membuat kebijakan, keputusan, atau mendistribusikan nilai (berupa barang dan jasa) untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

### **3. Pengertian Etika Politik**

Etika politik, menurut Franz Magnis Suseno (1994), adalah mempertanyakan tanggung jawab serta kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara. Adapun menurutnya, etika politik itu sendiri mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia (legitimasi kekuasaan politik). Yang kedua, etika politik merupakan tata krama dalam melakukan aktivitas politik (dimensi moral dalam berpolitik), seperti sikap ksatria, elegan, penuh kesantunan, dan memegang amanah.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis, untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif, dan etika politik tidak langsung terjun kepada politik praktis.

Etika politik Indonesia mengacu berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/Tahun 2001, tentang etika kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos

kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Sedangkan etika politik berdasarkan Pancasila merupakan adalah etika berpolitik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Etika politik Pancasila mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah.

#### **4. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia dan Kaitannya dengan Etika**

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa. Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk, yaitu *eidos* dan *logos*, yang berasal dari bahasa Yunani. Secara luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif.

Terdapat empat tipe ideologi, yaitu sebagai berikut.

1. Ideologi konservatif, merupakan ideologi yang memelihara keadaan yang ada setidaknya secara umum, meskipun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal-hal teknis.
2. Ideologi kontra, merupakan melegitimasi penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai yang sesuai dan malah dianggap baik.
3. Ideologi reformasi, merupakan ideologi yang bertujuan untuk mengubah keadaan.
4. Ideologi revolusioner, merupakan ideologi yang bertujuan untuk mengubah seluruh sistem nilai masyarakat.

Ideologi nasional bangsa Indonesia tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Ideologi tersebut adalah ideologi perjuangan yang sarat dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila sebagai

ideologi nasional, merupakan suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia.

Oleh karena itu, nilai-nilai yang tersurat maupun yang tersirat dalam Pancasila harus dijadikan landasan dan tujuan untuk mengelola kehidupan negara, bangsa, maupun masyarakat. Dengan kata lain nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma moral atau etika dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita bangsa Indonesia.

## **5. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sistem Etika Politik**

Menurut Frondizi (2001), nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Setiap warga negara Indonesia hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Menjunjung tinggi artinya ada kemajuan dan kesediaan warga masyarakat Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan serta pengarah tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar sistem etika politik. Hal ini berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan sila-sila, dimana sila-sila Pancasila itu menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, baik oleh rakyat ataupun penguasa. Taniredja (2012) mengatakan bahwa Pancasila sebagai sistem etika, bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berkaitan dengan Pancasila, nilai-nilai etika yang terkandung di setiap silanya adalah sebagai berikut.

### **1. Ketuhanan Yang Maha Esa**

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yaitu sang pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai

silanya pertama merupakan etika yang berlandaskan pada kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadat dan beragama bagi semua warga tanpa kecuali. Dengan demikian, silanya pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia.

#### 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab yang berarti berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari silanya kedua ini merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Silanya kedua mempunyai keterkaitan sangat erat dengan silanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Keduanya memberikan legitimasi moral religius dan moral kemanusiaan dalam kehidupan dan proses penyelenggaraan Negara.

#### 3. Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang berabeka ragam menjadi satu kebulatan. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari silanya ketiga merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Silanya ketiga merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh silanya pertama dan kedua. Oleh sebab itu, paham kebangsaan Indonesia merupakan paham nasionalisme yang mampu mengatasi paham golongan, suku, serta bangsa.

#### 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari silanya keempat merupakan etika yang menghargai kedudukan, hak, serta kewajiban warga masyarakat/warga negara, sehingga tidak memaksakan pendapat dan

---

kehendak kepada orang lain. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan diarahkan senantiasa untuk rakyat. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Seluruh rakyat berarti semua warga Negara Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kelima merupakan etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, serta kegotongroyongan. Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi aspek keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Pancasila dapat dijadikan tolak ukur suatu perbuatan manusia sebagai manusia yang baik atau buruk, dengan pedoman moral langsung yang bersifat objektif dan subjektif, terdapat pula pedoman moral tidak langsung yang mendalam dari Ilahi (Adnan, 2003). Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral pula.

## 6. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik

Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan. Melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama dan sila kedua merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Berdasarkan sila pertama, Negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religious, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Hal inilah yang membedakan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila ketiga). Oleh karena itu manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dalam kehidupan negara, juga dasar kehidupan, serta pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, asas-asas kemanusiaan bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar atau asasi manusia. Selain itu, asas kemanusiaan juga harus memiliki prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, menurut Suseno (1987), etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas-asas berikut ini.

1. Asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis).

3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, serta pembagian kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius (sila pertama), serta moral kemanusiaan (sila kedua).

Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, maka harus ada keadilan dalam hidup bersama (sila kelima) yang mana merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara.

Negara demokrasi adalah negara yang berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan serta kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila keempat). Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Maka dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan lain perkataan harus memiliki legitimasi demokratis.

Prinsip-prinsip dasar etika politik itu, harus direalisasikan dalam kehidupan kenegaraan dan senantiasa dilaksanakan secara korelatif diantara ketiganya. Kebijakan serta keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kenegaraan baik menyangkut politik dalam negeri maupun luar negeri, ekonomi nasional maupun global, dan yang menyangkut rakyat, serta lain sebagainya, selain berdasarkan pada hukum yang berlaku

(legimitasi hukum), harus mendapat legitimitasi rakyat (legitimitasi demokratis) dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas (legitimitasi moral) pula.

## **7. Pentingnya Pancasila sebagai Sistem dan Sumber Etika Politik di Indonesia**

Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Menurut Winarno (2012), Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem dan sumber etika politik di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia melemah. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem dan sumber etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah.
2. Korupsi akan merajalela, karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh para penyelenggara negara yang tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, serta baik

dan buruk. Pancasila ada sebagai sistem dan sumber etika yang berkaitan dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk.

3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem dan sumber etika dapat mengarahkan masyarakat untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.
4. Pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem dan sumber etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem dan sumber etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem dan sumber etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM.
5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem dan sumber etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan.

Kesadaran etika akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia, ketika nilai-nilai Pancasila itu diyakini kebenarannya oleh masyarakat, sehingga menjadi sebuah moralitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Margono (2002) berpendapat bahwa kesadaran etik akan lebih berkembang lagi jika nilai-nilai dan moral Pancasila dapat dijabarkan ke dalam norma-norma yang diberlakukan di Indonesia, yang mempunyai daya ikat yang kuat bagi masyarakat Indonesia dan ada kemauan serta

---

kesediaan untuk menegakkan norma-norma tersebut dengan sungguh-sungguh.

## **E. Kesimpulan**

Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Etika tersebut terdiri atas nilai-nilai moral yang menjadi pegangan hidup seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan politik merupakan suatu peristiwa, kegiatan, atau proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara dalam membuat kebijakan, keputusan, atau mendistribusikan nilai (berupa barang dan jasa) untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar sistem etika politik. Etika politik berdasarkan Pancasila adalah etika berpolitik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Etika politik Pancasila mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila harus dijadikan sebagai landasan dan tujuan untuk mengelola kehidupan negara, bangsa, maupun masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma moral atau etika dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar sistem etika politik berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan sila-sila, dimana sila-sila Pancasila itu menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, baik oleh rakyat ataupun penguasa.

Nilai-nilai tersebut harus dijadikan patokan dan diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral pula.

Pancasila merupakan sumber etika moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar, yaitu (legimitasi hukum), (legitimasi demokratis), dan (legitimasi moral). Prinsip-prinsip dasar tersebut, harus direalisasikan dalam kehidupan kenegaraan dan senantiasa dilaksanakan secara korelatif diantara ketiganya.

Pancasila sebagai sistem dan sumber etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Hal ini bertujuan agar tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia tetap utuh. Selain itu, Pancasila ada sebagai dasar pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Pancasila juga ada agar warga negara Indonesia memenuhi kewajiban dengan baik, tidak melanggar HAM, dan senantiasa menjaga lingkungan sekitar.

## **F. Saran**

Pancasila hendaknya disosialisasikan secara mendalam, sehingga dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, serta berpolitik dalam berbagai segi kegiatan dapat terwujud dengan baik dan lancar. Yang paling utama adalah mensosialisasikan Pancasila sebagai sistem dan sumber etika politik. Dengan begitu, tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia tetap utuh. Salah satu cara yang efektif bagi generasi muda adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, melalui pendidikan karakter di sekolah-sekolah.

## **G. Acknowledgment**

None.

## H. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

## I. Funding Information

None

## J. References

- BAB II Etika*. (2016). Diakses pada 9 April 2022, tersedia dari <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6956/3/BAB%20II.pdf>
- BAB II Tinjauan Pustaka*. (2016). Diakses pada 9 April 2022, tersedia dari <http://eprints.umm.ac.id/35920/3/jiptummpp-gdl-yudikurnia-48898-3-babii.pdf>
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Handoyo, Eko. Martien Herna Susanti., dan Moh. Aris Munandar. (2016). *Etika Politik (Edisi Revisi)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Oktavia Safitri, Alvira. & Anggraeni Dewi, Dinie. (2021). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang*. *EduPsyCouns Journal*, 3(1).
- Syamsir dkk. (2017). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Palembang: Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat.
- Syamsudin, M dkk. (2009). *Pendidikan Pancasila (Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Tetty Yulietty Munte, Rohdearny. *Modul 9 Pancasila sebagai Sistem Etika*. Diakses pada 8 April 2022, tersedia dari <https://docplayer.info/47744763-Modul-9-pancasila-sebagai-sistem-etika.html>
- Wasith Achadi, Muh. (2020). *Pancasila sebagai Falsafah Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Yanto, Dwi. (2017). *Etika Politik Pancasila*. *Ittihad Jurnal*, 15(27), 27-28.